



# **RENCANA KERJA (RENJA) 2025**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**JL. SOEKARNO-HATTA NO.35 (69116)**

**TLP/FAX 031-3094179**

**Email : [diskominfo@bangkalankab.go.id](mailto:diskominfo@bangkalankab.go.id)**

**B A N G K A L A N**

## **KATA PENGANTAR**

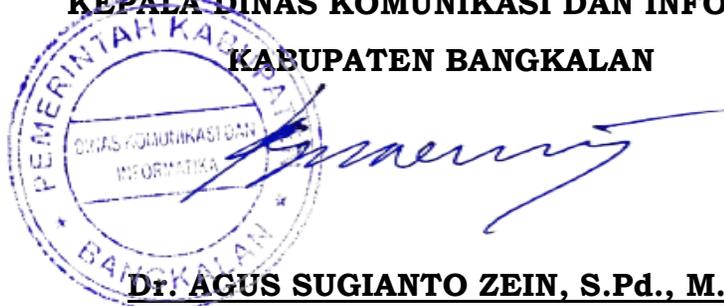
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan hasil Review Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 - 2026 dan juga merupakan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bangkalan No. 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang memuat berbagai kebijakan dan program kegiatan dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini disamping sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025 juga memuat *review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian pada tahun berjalan juga sebagai dasar perencanaan awal.

Akhirnya kami menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Dokumen Rencana Kerja ini, saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan dalam penyusunan dokumen selanjutnya.

Bangkalan, 31 Juli 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANGKALAN**



**Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640814 198703 1 012

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	44
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>45</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	45
3.3 Program dan Kegiatan .....	49
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>50</b>
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>62</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Sebagai dokumen perencanaan tahunan dokumen ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Dokumen Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dalam perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026.

Untuk menghasilkan sebuah Dokumen Renja yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Renja PD
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD
- c. Penyusunan Rancangan Renja PD
- d. Perumusan Rancangan Akhir
- e. Penetapan

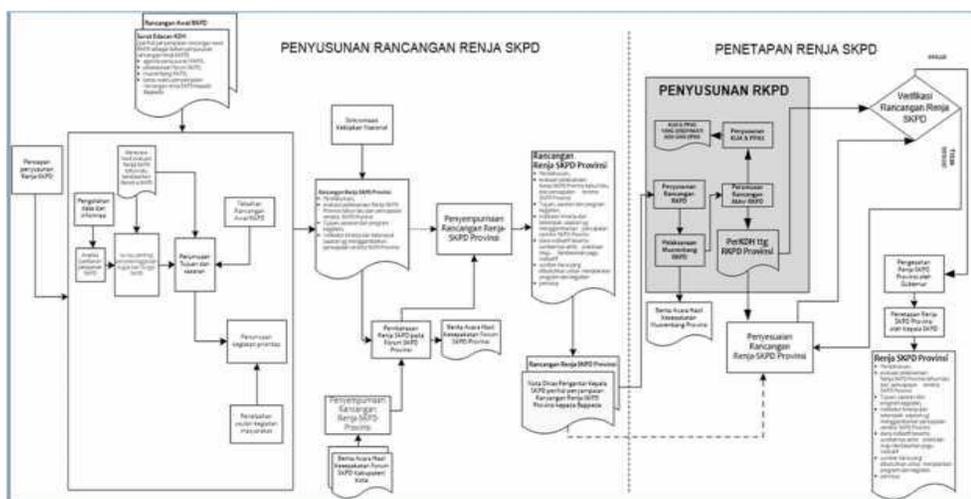
Mengingat arti strategis Dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Persyaratan penyusunan RAPBD melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun bagan alur tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini:



Gambar 1.1

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahn serta tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diperbarui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
13. Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan;
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
16. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 33 Seri E)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Maksud dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan yang sudah dilaksanakan pada perencanaan tahun 2024 dan melanjutkan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2025.

#### **B. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Tahun 2025. Disamping itu untuk menyusun rencana skala prioritas dan plafon anggaran tahun 2025 serta untuk mewujudkan pembangunan daerah berkesinambungan dan berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dan garis besar isi Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

##### 1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

##### 2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### 3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

##### 4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

##### 5. BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra**

Rencana Kerja adalah penjabaran rencana strategis menjadi program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik. Rencana Kerja menyajikan dasar pengukuran kinerja dan sasaran yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun (n-2) dan perkiraan target tahun berjalan (n-1).

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan capaian RPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan s/d Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan/Sub Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir peiode Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progra m, Kegiata n dan Sub Kegiata n s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									

<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90</b>	<b>indeks</b>											
<b>2.16.01.2.0 1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun tepat waktu</b>	<b>10 0</b>	<b>%</b>											
2.16.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dok	0	dok	4	dok	4	dok	100	3	dok	7	100%
2.16.01.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3	dok	0	dok	1	dok	1	dok	100	1	dok	2	67%
2.16.01.2.01. 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan	3	dok	0	dok	1	dok	1	dok	100	1	dok	2	67%

	Perubahan RKA-SKPD	RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	dok	0	dok	1	dok	1	dok	100	1	dok	2	67%
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	dok	0	dok	1	dok	1	dok	100	1	dok	2	67%
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3	dok	0	dok	1	dok	1	dok	100	1	dok	2	67%

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	laporan	0	laporan	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	2	67%
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>100</b>	<b>%</b>											
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	189	orang	53	orang	63	orang	63	orang	100	63	orang	179	95%
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	laporan	0	laporan	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	2	67%

2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	19 8	laporan	6 6	laporan	66	laporan	66	laporan	100	6 6	laporan	198	100%
<b>2.16.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>											
2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	42	laporan	0	laporan	14	laporan	14	laporan	100	1 4	laporan	28	67%
<b>2.16.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pakaian Aparatur yang Diadakan</b>	<b>80</b>	<b>%</b>											
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	38 4	paket	0	paket	0	paket	0	paket	0	0	paket	0	0

	Kelengkapannya	Kelengkapan													
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	0	orang	0	0
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	0	orang	0	0
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>											
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	paket	0	paket	12	paket	12	paket	100	12	paket	24	67%
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	36	paket	0	paket	12	paket	12	paket	100	12	paket	24	67%

	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	paket	0	paket	12	paket	12	paket	100	1 2	paket	24	67%
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	0	paket	1	paket	1	paket	100	1	paket	2	67%
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36	dokumen	1 2	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100	1 2	dokumen	36	100%
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 0	laporan	5 0	laporan	0	laporan	0	laporan	0	5 0	laporan	100	67%
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>80</b>	<b>%</b>											

		<b>Daerah yang terlaksana</b>													
2.16.01.2.0005	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	0	unit	0	0%
2.16.01.2.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka	6	unit	1	unit	0	unit	0	unit	0	0	unit	1	17%
<b>2.16.01.2.008</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>80</b>	<b>%</b>											
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	3	100%
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	9	laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan	100	3	laporan	9	100%

		Disediakan													
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100	5	Laporan	15	100%
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>80</b>	<b>%</b>											
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63	Unit	2 1	unit	21	unit	21	unit	100	2 1	unit	63	100%
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	9	Unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	0	unit	0	0

		Dipelihara/Direhabilitasi													
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75	Unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	25	unit	25	33%
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provins</b>	<b>100</b>	<b>%</b>											
2.16.02.2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai</b>	<b>100</b>	<b>%</b>											

		<b>dengan strategi komunikasi</b>													
2.16.02.2.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi PD	Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	0	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	0	dokumen	1	100
2.16.02.2.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0
2.16.02.2.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0
2.16.02.2.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0	dokumen	0	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100	0	dokumen	12	100
2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan	12	laporan	0	laporan	0	laporan	0	laporan	0	0	laporan	0	0

	Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika													
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12	Permohonan	0	permohonan	0	permohonan	0	permohonan	0	0	permohonan	0	0
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12	Rekomendasi	0	rekomendasi	0	rekomendasi	0	rekomendasi	0	0	rekomendasi	0	0
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik	6	Media	0	media	0	media	0	media	0	0	media	0	0

		pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis													
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFFORMATIKA</b>	<b>Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>	<b>22</b>	<b>%</b>											
		<b>Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>	<b>22</b>	<b>%</b>											
<b>2.16.03.2.0</b> <b>2</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</b>	<b>22</b>	<b>%</b>											

2.16.03.2.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan	0	menara	0	menara	21 0	menara	21 0	menara	100%	0	menara	0	0
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0	Paket	0	paket	1	paket	1	paket	100%	1	paket	2	100
		jumlah website resmi yang dikelola	0	website	0	website	2	website	2	website	100%	0	website	0	0
2.16.03.2.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	0	aplikasi	0	aplikasi	1	aplikasi	1	aplikasi	100	0	aplikasi	1	100
		Jumlah sosialisasi yang diadakan	0	kegiatan	0	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100	0	kegiatan	1	100
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	5	aplikasi	0	aplikasi	0	aplikasi	0	aplikasi	0	0	aplikasi	0	0

2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	61	Perangkat Daerah	0	0	Perangkat Daerah	0	0						
<b>2.2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>														
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>50</b>	<b>%</b>											
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kegiatan statistik di lingkup PD</b>													
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan,	0	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0

	Diseminasi Data Statistik Sektoral	Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral													
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0	orang	0	orang	61	orang	20	orang	33%	20	orang	40	66
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	0	orang	0	orang	61	orang	0	orang	0	61	orang	61	100
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	61	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	0	orang	0	0
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	60	%	0	%	0	%	0	%	0	0	%	0	0
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah	1	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0

	dengan Prinsip Satu Data Indonesia	dilengkapi metadat													
<b>2.21</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah</b>	<b>22</b>	<b>%</b>											
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi di lingkup PD</b>	<b>22</b>	<b>%</b>											
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	18 3	Perangka t Daerah	6 1	Perangka t Daerah	61	Perangka t Daerah	61	Perangka t Daerah	100%	6 1	Perangka t Daerah	61	33%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bangkalan termasuk Tipe B (Sekretariat dan 3 Bidang) dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi:  
Sub Koordinator dan kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Aplikasi Informatika membawahi:  
Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik membawahi:  
Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi dan informatika terkait Urusan pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan Pemerintahan bidang persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangkalan melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dan fungsi urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

a. Tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

b. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan daerah bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang Komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan

No.	Indikator kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026	
1	<b>Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah</b>													
a	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah						82.51%	70%						
2	<b>Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah</b>													
a	Persentase jumlah berita dipublikasikan						52%	100%						
3	<b>Tersedianya statistik daerah</b>													
a	Prosentase Jumlah data statistik sektoral yg dihasilkan						29%	60%						
4	<b>Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan</b>													
a	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan						83	85						
1	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>													
a	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			18%	20%	22%								

2	<b>Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat</b>													
a	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik			100%	100%	100%								
b	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah			22%	44%	88%								
c	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			22%	50%	75%								
3	<b>Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika</b>													
a	Nilai Sakip PD			60	61	62								
b	Indeks kepuasan masyarakat			85	87	90								

**Jumlah Sarana & Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Di  
Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 – 2023**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Base Transceiver Station / BTS (Menara)	275	275	200	201	201	203	203
2	Jumlah Kantor Pos	18	18	18	18	18	18	18
3	Jumlah Stasiun Radio Pemerintah (Stasiun)	1	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah Surat Kabar Nasional	8	8	8	8	8	8	8
5	Jumlah Surat Kabar Lokal	4	4	4	4	4	4	4

**Kinerja Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 – 2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Target	2,3 (Cukup)	2,6 (Baik)	2,9 (Baik)	3,2 (Baik)	2 - 2,20 (Cukup)
2	Realisasi	2,3 (Cukup)	2,6 (Baik)	1,62 (Cukup)	1,89 (Cukup)	2,63 (Baik)

**Jumlah Elemen Data Statistik Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023**

Bidang	Jumah Elemen Data				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kesehatan	51	49	49	52	19
Penanaman Modal	4	4	4	4	7
Pendapatan	1	1	1	1	4
Sosial	7	8	8	8	21
Pendidikan	6	7	7	7	20
Koperasi	0	6	6	6	8
Pariwisata	0	2	2	2	10
Pertanian	0	11	11	11	16
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>105</b>

## Kinerja Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023

Indeks KAMI (Keamanan Informasi)		
Skor Kategori SE	31	
Kategori SE	Tinggi	
Hasil Evaluasi Akhir	Tidak Layak	
Indikator Indeks KAMI		
Tata Kelola	40	Tingkat Kematangan I+
Pengelolaan Risiko	6	Tingkat Kematangan I
Kerangka Kerja Keamanan Informasi	26	Tingkat Kematangan I
Pengelolaan Aset	31	Tingkat Kematangan I+
Teknologi dan Keamanan Informasi	81	Tingkat Kematangan II
Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga	2%	-
Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan	10%	-
Perlindungan Data Pribadi	0%	-

### 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

#### 2.3.1 Perangkat Daerah yang baru terbentuk

Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan berdiri berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah seiring berjalannya waktu tentunya ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi seperti halnya prasarana dan sumber daya yang handal.

#### 2.3.2 Keterbatasan SDM

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan adalah Institusi yang membawahi 3 (Tiga) Urusan Pemerintah di daerah yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan Persandian Negara dan operasional website. Dari sejumlah 62 Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan hanya 35% yang memenuhi kualifikasi tersebut. Komposisi Kepegawaian tersebut sangat mengganggu terhadap pencapaian Kinerja Organisasi secara maksimal

### **2.3.3 Keterbatasan Sarana dan Prasarana Teknis**

Salah satu sub urusan pemerintah bidang Kominfo adalah aplikasi informatika. Sub urusan ini dimaksudkan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di daerah agar menerapkan teknologi informasi atau penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan baik pelayanan administrasi sesama instansi pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi ini dibutuhkan dukungan infrastruktur baik berupa instalasi jaringan, *hardware* maupun *software*. Sarana dan prasarana teknis ini menjadi dasar bagi terbangunnya sistem informasi yang terkoneksi antara Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengelola domain resmi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan sub domain yang di kelola oleh masing masing perangkat daerah. Sistem yang ada saat ini koneksi antar OPD masih berbasis *wireless* sehingga rentan terhadap gangguan. Sementara sistem informasi terkini membutuhkan kecepatan, keakuratan dan kapasitas pengiriman data yang memadai.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam setiap penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika selalu dilakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target yang akan dicapai/direncanakan sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Program dan Kegiatan yang ada sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, namun karena adanya keterbatasan anggaran dari APBD Kabupaten Bangkalan, harus dilakukan penyesuaian program dan kegiatan pada tahun 2025. Selanjutnya program dan kegiatan ini diharapkan mampu mendukung tercapainya visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Adapun *review* terhadap rancangan RKPD tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan</b>	<b>Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo</b>	<b>20%</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan</b>	<b>Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo</b>	<b>20%</b>	<b>1,700,000,000</b>	
	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</b>	<b>20%</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</b>	<b>20%</b>	<b>1,700,000,000</b>	
1	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	5 Aplikasi	200,000,000	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	5 Aplikasi	200,000,000	

2	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	61 Perangkat daerah	1,800,000,000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	61 Perangkat daerah	1,500,000,000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah</b>	<b>44%</b>	<b>40,390,000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah</b>	<b>44%</b>	<b>100,000,000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi di lingkup PD</b>	<b>44%</b>	<b>40,390,000</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi di lingkup PD</b>	<b>44%</b>	<b>100,000,000</b>	
3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	61 PD	40,390,000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	61 PD	100,000,000	

	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi</b>	100%	1,430,814,000	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi</b>	100%	1,424,940,000	
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi</b>	100%	1,430,814,000	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi</b>	100%	1,424,940,000	
4	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		umlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian	1 dokumen	350,000,000	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		umlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian	0 dokumen	-	

			Komunikasi dan Informatika					Komunikasi dan Informatika			
5	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 dokumen	6,150,000	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 dokumen	50,000,000	
6	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 dokumen	900,000,000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 dokumen	1,100,000,000	
7	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	6 media	174,664,000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	6 media	274,940,000	

	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>50%</b>	<b>15,300,000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>50%</b>	<b>50,000,000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase kegiatan statistik di lingkup PD</b>	<b>50%</b>	<b>15,300,000</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase kegiatan statistik di lingkup PD</b>	<b>50%</b>	<b>50,000,000</b>	
8	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	61oran g	5,250,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	61ora ng	9,369,100	
9	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	60%	4,800,000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	60%	5,754,450	
10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 doku men	5,250,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 doku men	34,876,450	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		<b>Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>87%</b>	<b>6,685,350,40 2</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		<b>Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>87%</b>	<b>7,023,988,127</b>	

	DAERAH KABUPATEN/KOTA					DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>24,358,449</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6,475,000</b>	
1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD	2 dokum en	5,017,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD	2 doku men	720,000	
1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen rka-skpd	1 dokum en	3,293,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen rka-skpd	1 doku men	1,500,000	
1 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah dokumen perubahan rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	1 dokum en	3,692,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah dokumen perubahan rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	1 doku men	1,500,000	
1 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah dokumen dpa-skpd dan laporan hasil	1 dokum en	3,370,449	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah dokumen dpa-skpd dan laporan hasil	1 doku men	500,000	

			koordinasi penyusunan dokumen dpa-skpd					koordinasi penyusunan dokumen dpa-skpd			
1 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah dokumen perubahan dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan dpa-skpd	1 dokum en	3,356,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah dokumen perubahan dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan dpa-skpd	1 doku men	500,000	
1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1 laporan	3,692,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1 lapora n	450,000	
1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	1,937,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 lapora n	525,000	
1 8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 data	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 data	780,000	

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>4,930,645,402</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>5,506,465,527</b>	
18	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	63 org/bln	4,925,869,402	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	63 org/bln	5,505,565,527	
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	1 laporan	3,776,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	1 laporan	425,000	
20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /smesesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan bulanan/triwulanan /smesesteran skpd	66 laporan	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /smesesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan bulanan/triwulanan /smesesteran skpd	66 laporan	475,000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada</b>	<b>100%</b>	<b>800,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada</b>	<b>100%</b>	<b>800,000</b>	

			<b>Perangkat Daerah yang tersusun</b>					<b>Perangkat Daerah yang tersusun</b>			
2 1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd	14 laporan	800,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd	14 laporan	800,000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	<b>80%</b>	<b>6,000,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	<b>80%</b>	-	
2 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	128 paket	1,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 paket	-	
2 3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	2,500,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0 orang	-	
2 4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	1 orang	2,500,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	0 orang	-	

			Perundang-Undangan					Perundang-Undangan			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>63,705,050</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>32,480,166</b>	
2 5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	6,114,800	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	2,115,800	
2 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	12 paket	14,970,250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	12 paket	17,491,800	
2 7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	6,575,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	1,875,000	
2 8	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	1 paket	10,535,000	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	1 paket	4,325,566	
2 9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	4,860,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	-	

30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	20,650,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	6,672,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>80%</b>	<b>2,910,052</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>80%</b>	<b>6,370,500</b>	
31	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diadakan	1 unit	1,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diadakan	0 unit	-	
32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 unit	1,910,052	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0 unit	-	
33	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	6,370,500	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>80%</b>	<b>1,536,046,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>80%</b>	<b>1,449,062,500</b>	
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	6,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	11,500,000	

									n		
3 5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	312,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	290,000,000	
3 6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 laporan	1,217,546,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 laporan	1,147,562,500	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>80%</b>	<b>120,885,449</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>80%</b>	<b>22,334,434</b>	
3 7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	14,992,850	
3 8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	3 unit	100,985,449	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	0 unit	-	

	Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang disediakan			Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang disediakan			
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	8,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	5,000,000	
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25 unit	11,400,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	2,341,584	



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sasaran Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah :

- a. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
- b. Meningkatnya cakupan wilayah yang melayani penyiaran digital
- c. Meningkatnya konektivitas layanan pos
- d. Terwujudnya konektivitas *Next Generation* Nasional
- e. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan infomatika
- f. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
- g. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
- h. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
- i. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- j. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan:

- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
- b. Meningkatnya pelayanan penyebarluasan informasi yang tepat dan akurat
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika

Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah selaras dengan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan serta mendukung sasaran yang hendak dicapai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia walaupun sasaran yang ingin dicapai lebih luas dan kompleks.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika**

Tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan untuk membangun sebuah rencana sebagai pedoman dalam menyusun program dan indikator kinerja 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenang yang dilimpahkan. Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Diskominfo Kabupaten Bangkalan Tahun 2025.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diuraikan diatas terkait dengan Renstra, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

**“ Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi”**

Sedangkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan adalah Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan berintegritas Tinggi. Dimana sasaran yang ingin dicapai dari misi tersebut adalah pelaksanaan kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika, sidang statistik dan bidang persandian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut adalah meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah:

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
- Meningkatkan pelayanan penyebarluasan informasi yang tepat dan akurat
- Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada Renja tahun 2025 tertuang dalam tabel 3.1 dibawah ini :

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2025	2026			2025	2026	
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,75 B	3 B	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20%	22%	
				Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	100%	100%	
					Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	44%	88%	

					Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	50%	75%	
				Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Nilai Sakip PD	61	62	
					Indeks kepuasan masyarakat	87	90	

### **3.3 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika**

#### **Kabupaten Bangkalan**

##### **A. Program Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Nasional**

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

##### **B. Program Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Provinsi**

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

##### **C. Program Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Daerah**

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

##### **D. Program Kegiatan Yang Mendukung Isu Strategis Daerah**

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Tahun 2026**

Program merupakan kumpulan Kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan bertugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistikk dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Untuk mendukung tugas tersebut maka ditetapkan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD
  - Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA – SKPD
  - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - Evaluasi kinerja perangkat daerah
  - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
  - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah

- Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan bahan logistik kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

## **2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelayanan informasi publik
  - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
  - Pengelolaan Media Komunikasi Publik

## **3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

- a. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
  - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

#### **4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  - Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
  - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

#### **5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

Rencana Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tersaji pada tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>	<b>Kantor Diskominf o Kab. Bangkalan</b>	20%	1,700,000,000			22%	1,700,000,000
2.16.03.2.02	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</b>		20%	1,700,000,000			22%	1,700,000,000
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		5 Aplikasi	200,000,000	DAUM		5 Aplikasi	200,000,000
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		61 Perangkat Daerah	1,500,000,000			61 Perangkat Daerah	1,500,000,000

2.21.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah</b>	<b>Kantor Diskominf o Kab. Bangkalan</b>	44%	100,000,000			88%	100,000,000
2.21.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi di lingkup PD</b>		44%	100,000,000			88%	100,000,000
2.21.02.2.01.000 4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		61 PD	100,000,000	DAUM		61 PD	100,000,000
2.16.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah provinsi</b>	<b>Kantor Diskominf o Kab. Bangkalan</b>	100%	1,424,940,00 0			100%	1,424,940,00 0
2.16.02.2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi</b>		100%	1,424,940,00 0			100%	1,424,940,00 0
2.16.02.2.01.001 6	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika		0 dokumen	-	DAUM		0 dokumen	-

2.16.02.2.01.001 7	Pelayanan informasi publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		12 dokumen	50,000,000	DAUM		12 dokumen	50,000,000
2.16.02.2.01.001 9	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		12 dokumen	1,100,000,000	DAUM		12 dokumen	1,100,000,000
2.16.02.2.01.002 1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		6 media	274,940,000	DAUM		6 media	274,940,000
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan</b>	<b>50%</b>	<b>50,000,000</b>			<b>75%</b>	<b>50,000,000</b>
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kegiatan statistik di lingkup PD</b>		<b>50%</b>	<b>50,000,000</b>			<b>75%</b>	<b>50,000,000</b>
2.20.02.2.01.000 7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		61orang	9,369,100	DAUM		61orang	9,369,100
2.20.02.2.01.000 9	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		60%	5,754,450	DAUM		60%	5,754,450
2.20.02.2.01.001 0	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadat		1 dokumen	34,876,450	DAUM		1 dokumen	34,876,450

<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Kantor Diskominf o Kab. Bangkalan</b>	<b>87%</b>	<b>7,023,988,12 7</b>			<b>90%</b>	<b>7,023,988,12 7</b>
<b>2.16.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kantor Diskominf o Kab. Bangkalan</b>	<b>100%</b>	<b>6,475,000</b>			<b>100%</b>	<b>6,475,000</b>
2.16.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	720,000	DAUM		2 dokumen	720,000
2.16.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		1 dokumen	1,500,000	DAUM		1 dokumen	1,500,000
2.16.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		1 dokumen	1,500,000	DAUM		1 dokumen	1,500,000
2.16.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		1 dokumen	500,000	DAUM		1 dokumen	500,000
2.16.01.2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		1 dokumen	500,000	DAUM		1 dokumen	500,000

2.16.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 laporan	450,000	DAUM		1 laporan	450,000
2.16.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 laporan	525,000	DAUM		1 laporan	525,000
2.16.01.2.01.000 9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		4 data	780,000	DAUM		4 data	780,000
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Kantor Diskominf o Kab. Bangkalan</b>	<b>100%</b>	<b>5,506,465,527</b>			<b>100%</b>	<b>5,506,465,527</b>
2.16.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		63 org/bln	5,505,565,527	DAUM		63 org/bln	5,505,565,527
2.16.01.2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	425,000	DAUM		1 laporan	425,000
2.16.01.2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		66 laporan	475,000	DAUM		66 laporan	475,000

		an SKPD							
<b>2.16.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun</b>	<b>Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan</b>	<b>100%</b>	<b>800,000</b>			<b>100%</b>	<b>800,000</b>
2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		14 laporan	800,000	DAUM		14 laporan	800,000
<b>2.16.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana</b>	<b>Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan</b>	<b>80%</b>	-			<b>80%</b>	-
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		0 paket	-	DAUM		0 paket	-
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		0 orang	-	DAUM		0 orang	-
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		0 orang	-	DAUM		0 orang	-
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan</b>	<b>80%</b>	<b>32,480,166</b>			<b>80%</b>	<b>32,480,166</b>

2.16.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 paket	2,115,800	DAUM		12 paket	2,115,800
2.16.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 paket	17,491,800	DAUM		12 paket	17,491,800
2.16.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 paket	1,875,000	DAUM		12 paket	1,875,000
2.16.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	4,325,566	DAUM		1 paket	4,325,566
2.16.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 dokumen	-	DAUM		12 dokumen	-
2.16.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 laporan	6,672,000	DAUM		50 laporan	6,672,000
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana</b>	<b>Kantor Diskominf o Kab. Bangkalan</b>	<b>80%</b>	<b>6,370,500</b>			<b>80%</b>	<b>6,370,500</b>
2.16.01.2.07.000 5	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan		0 unit	-	DAUM		0 unit	-
2.16.01.2.07.001 1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		0 unit	-	DAUM		0 unit	-

	kantor atau bangunan lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Diadakan							
2.16.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 unit	6,370,500	DAUM		1 unit	6,370,500
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan</b>	<b>80%</b>	<b>1,449,062,500</b>			<b>80%</b>	<b>1,449,062,500</b>
2.16.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	11,500,000	DAUM		1 Laporan	11,500,000
2.16.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 laporan	290,000,000	DAUM		3 laporan	290,000,000
2.16.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 laporan	1,147,562,500	DAUM		5 laporan	1,147,562,500
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan</b>	<b>80%</b>	<b>22,334,434</b>			<b>80%</b>	<b>22,334,434</b>
2.16.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		17 unit	14,992,850	DAUM		0 unit	14,992,850
2.16.01.2.09.000 2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan		0 unit	-	DAUM		21 unit	-

	operasional atau lapangan	pajak dan perizinannya							
2.16.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	5,000,000	DAUM		3 unit	5,000,000
2.16.01.2.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 unit	2,341,584	DAUM		10 unit	2,341,584

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat *Community Base Development* (CBD). Dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*.

**Output Rencana Kerja** adalah **Program Tahunan** Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program. Selain menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan rencana selanjutnya.

Semoga dokumen rencana kerja Dinas ini mampu mengantarkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Bangkalan.

Bangkalan, 31 Juli 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANGKALAN**



**Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640814 198703 1 012